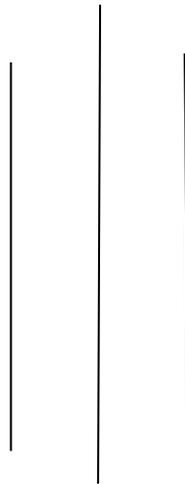




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TS 2023-2024
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI KE KAB MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 04 – 08 OKTOBER 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN	5
II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	10
III. PENUTUP	11
LAMPIRAN	122
Dokumentasi Kegiatan	122



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
KE KAB MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 04 – 08 OKTOBER 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal September 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Industri;
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 tanggal 04 – 08 Oktober 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si (A-130/F-Gerindra/Dapil Sulsel II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Bupati Morowali bersama SKPD dan Direksi PT. IMIP beserta seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI membahas terkait program dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi terhadap Kawasan Industri di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Peninjauan Jalan dan Jembatan pendukung kawasan industri di kab Morowali.
3. Peninjauan Terminal Khusus di kawasan Industri Morowali.
4. Peninjauan infrastruktur pendukung kawasan IMIP

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan

Beberapa temuan dan permasalahan serta usulan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024, adalah sebagai berikut:

a. Kementerian PUPR

- **Usulan Pemerintah Kab Morowali**

Beberapa usulan Pemerintah Kab Morowali terkait Kementerian PUPR yaitu sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

- 1) Pembangunan Tanggul Sungai di desa Kafalagadi, BLK Lama, Dalam Kota Bungku, Kantor Keuangan dan Keluarahan Lamberea
- 2) Pembangunan Break Water di desa Masadian, Bakal, Terebino, Pulau Tiga dan Desa Bahomohoni
- 3) Pembangunan Seawall dan Bnagunan Pengaman Pantai di desa Puungkoilu, Jawi-jawi dan desa Buajangka
- 4) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman di desa Solonsa Jaya, Kolono Ululere dan desa One Pute.
- 5) Tingginya tingkat kerusakan pengaman pantai akibat ombak dan banjir.

- **Bidang Bina Marga**

Usulan penanganan ruas jalan daerah di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah:

- 1) Pelebaran ruas jalan dalam Kecamatan Bahodopi terkhususnya Pengaspalan Bahu Jalan di Desa Bahodopi, Bahomakmur, Keurea, Fatufia, dan desa Makarti Jaya.
- 2) Pembangunan Drainase pada ruas Jalan dalam kecamatan Bahodopi di desa Bahodopi, Bahomakmur, Keurea, Fatufia, dan desa Makarti Jaya.
- 3) Pelebaran, Cut and Fill Ruas jalan Bungku-Bahodopi di kecamatan Bungku Tengah, Kec Bungku Timur dan Kec Bahodopi.
- 4) Peningkatan jalan bandara sebagai akses bandara maleo Morowali.

- **Bidang Cipta Karya**

- 1) Peningkatan SPAM IKK Kec Bahodopi di desa Bahodopi, Bahomakmur, Keurea, Fatufia dan Desa Labota
- 2) Pembangunan SPAM IKK Kec Bumi Jaya di desa Parilengke, Bahonsuai, Samerenda, Sampeantaba dan desa Karaupa
- 3) Pembangunan sanitasi di kepulauan di kecamatan Bungku Selatan dan kecamatan Menui Kepulauan
- 4) Terdapat kondisi kumuh berat sekitar 32 ha di kecamatan Bahodopi
- 5) Pembangunan TPA dan penataan pemukiman di Desa Bohodopi
- 6) Masih terdapat kemiskinan ekstrim di Morowali dan perlu perhatian serius oleh pemerintah pusat.

- **Bidang Perumahan**

Saat ini masih terdapat rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Adapun rincian yang perlu penanganan serius bagi masyarakat di kabupaten Morowali baik pembangunan rumah BSPS maupun Rumah Khusus.

b. Kementerian Perhubungan

- Usulan Pemerintah Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah:

Perhubungan Darat

- 1) Diperlukan dukungan terkait penerangan Jalan Umum di ruas jalan kawasan industri Morowali
- 2) Mengusulkan agar memperbanyak rambu-rambu jalan di sepanjang jalan di kabupaten Morowali.
- 3) Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk pembangunan Jembatan timbang mengingat kendaraan dengan tonase berlebih melewati jalan di kawasan industri Morowali.

- 4) Perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama seluruh stakeholder di daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Terdapat kemacetan parah pada seluruh ruas jalan kawasan industri Morowali pada kondisi pergantian shift karyawan yang sangat mengganggu lalu lintas di jalan
- 6) Perlu peningkatan koordinasi dengan kepolisian dan pihak IMIP untuk mengatur lalu lintas di ruas jalan kawasan industri Morowali.

Perhubungan Udara

- 1) Terdapat akses jalan negara sepanjang 200 meter yang belum di bebaskan dan sangat mempengaruhi aktivitas keluar masuk bandara Morowali
- 2) Terkait dengan perpanjangan runway perlu dilakukan relokasi sungai Umbele oleh Pemerintah daerah
- 3) Terdapat ruang tunggu penumpang yang sangat kecil dan tempat parkir kendaraan juga sangat kecil
- 4) Belum melayani cargo karena belum tersedia gedung penampung cargo
- 5) Perencanaan kedepan kabupaten Morowali membutuhkan perluasan terminal dari 1000-2000 m termasuk juga ketersediaan pesawat Airbus untuk mengangkut penumpang yang setiap hari meningkat.

Perhubungan Laut

- 1) Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale melayani 23 Tersus di wilayah Morowali Utara dan 45 Tersus di Wilayah Morowali dengan kapasitas yang sudah berijin dan yang belum berijin.
- 2) Sampai dengan September 2023 terdapat kunjungan kapal di wilayah UPP Kolonedale sebanyak 19.387 dan meningkat sekitar 4000 kunjungan kapal dari tahun 2022.
- 3) Realisasi PNBPU UPP Kolonedale tahun anggaran 2023/ 1 Oktober adalah sebesar Rp 56, 9 M atau 88 % dari Target tahun 2023 sebesar Rp 64,9 M.

terdapat penambahan target penerimaan PNBPN diakarenakan realisasi semester I tahun 2023 lebih dari 65%. Dan terdapat peningkatan setiap tahun.

- 4) Perlu pengembangan pelabuhan Bungku guna memaksimalkan pelayanan Tersus di kawasan industri Morowali

c. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

- Terhadap daerah tertinggal yang masih ada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan dapat dikeluarkan dari status daerah tertinggal.
- Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah masih membutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

d. BMKG

- Diperlukan penambahan peralatan monitoring kegempaan di Kab Morowali;
- Perlu untuk meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang aman dari ancaman potensi bencana.

e. BNPP/BASARNAS

- Diperlukan peningkatan kelengkapan alat SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan di Morowali untuk mendukung pencarian dan pertolongan di kawasan industri Morowali;
- Diperlukan peningkatan status Kantor Pencarian dan Pertolongan
- Diperlukan penambahan jumlah personil dan pemenuhan pengadaan perluasan lahan Kantor Pencaria ndan Pertolongan di Morowali.

f. Peninjauan Ruas Jalan Kawasan Industri Morowali

Beberapa poin-poin utama yang menjadi temuan di lapangan dan perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain:

- 1) Penyediaan akses jalan belum memadai, sempit dan perlu pelebaran sesuai geometric jalan dimana kondisi saat ini mobilitas padat kendaraan berat dengan elevasi tinggi pada beberapa segmen sehingga mengakibatkan kecelakaan.

- 2) Kondisi jalan rusak dan bertambahnya jumlah kendaraan pada ruas jalan Bungku-Bahodopi mengakibatkan kemacetan. Termasuk juga tidak ada drainase/saluran pembuang dan buangan air dari pemukiman masyarakat mengalir ke jalan sehingga genangan air terjadi pada badan jalan.
- 3) Akses utama ruas jalan bandara kondisi belum teraspal sehingga belum di manfaatkan secara maksimal dan saat ini akses yang digunakan masih alternative ruas jalan dalam desa perbatae.
- 4) Terkait dengan pelaksanaan Inpres tentang Jalan Daerah, harus dilakukan secara berkeadilan dan merata sehingga masyarakat di kabupaten Morowali mendapat akses jalan yang baik.
- 5) Diharapkan dengan adanya kehadiran kawasan industri Morowali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ke arah lebih baik.

g. Peninjauan Terminal Khusus Bungku dan Fatufia

- 1) Pengelolaan terminal khusus untuk mendukung Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di kelola oleh PT.Bintang Delapan Mineral sejak tahun 2006. sebagai "*founding father*", Bintang Delapan Group menuju perusahaan raksasa dunia berbasis nikel dengan luas area IUP 21.659 ha.
- 2) Seluruh pabrik di IMIP tersebut terkoneksi dengan pelabuhan ini yang telah dibangun di kawasan PT IMIP dan mampu disandari kapal hingga berbobot 100 ribu Dead Weight Tonnage (DWT).
- 3) Total Muatan yang dibongkar atau di muat di Tersus ini mulai tahun 2009 - 2022 untuk Ekspor – Impor sebesar 26,096,813 Ton, sementara Cargo Lokal sebesar 66,335,655 Ton.
- 4) Terkait jumlah kunjungan kapal di Tersus PT. Bintang Delapan Mineral Tahun 2022 yakni Kapal Ekspor - Impor: 1030 Kapal dan Kapal Lokal: 6638 kapal.
- 5) Tersus PT. BintangDelapan Mineral beroperasi di 2 lokasi yakni di Labota dengan Luas : 83,32 Ha, 10 jetty Vessel & 29 jetty tongkang. Sementara Tersus PT. BintangDelapan Mineral di Fatufia dengan Luas : 59,98 Ha, 11 jetty Vessel & 12 jetty tongkang.

- 6) Rencana pengembangan kedepan :
 - a) Penambahan Jetty vessel Tersus PT. BDM di fatufia untuk mengurangi masa tunggu kapal dan memperlancar kegiatan ekspor – impor barang.
 - b) Pengembangan wilayah Pelabuhan Tersus PT. BDM di labota sekitar 63 Ha.
 - c) Penambahan Harbour tug guna mempercepat penyandaran kapal

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian Kondisi rusaknya jalan nasional dan drainase untuk aktivitas masyarakat di kabupaten Morowali.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melanjutkan penyelesaian perencanaan dan pembangunan TPA di Desa Bohodopi kab Morowali sehingga dapat di manfaatkan oleh masyarakat.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan penataan kawasan industri secara detail, penyediaan air baku, penyediaan akses air minum, penyediaan sistem sanitasi yang layak dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat untuk mendukung kawasan industri di kabupaten Morowali.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan pemanfaatan Terminal Khusus pada kawasan Industri Morowali, dalam upaya peningkatan pemanfaatan PNBK di kabupaten Morowali
5. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kendaraan dengan muatan berlebih, Komisi V DPR RI Meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengadaan jembatan timbang dan memperbanyak PJU di kabupaten Morowali.
6. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya

pengentasan daerah tertinggal, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Terkait sejumlah usulan dari Pemerintah Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke kab Morowali, Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan infrastruktur yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan mengedepankan aspek-aspek skala prioritas, akuntabilitas, dan memberikan *output* dan *outcome* yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 04 – 08 Oktober 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

KETUA TIM

ttd

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE., M.Si

No. Anggota: A-130

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan











